

DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

TAHUN 2007-2016

Jurnal Publikasi



Oleh:

Nama : Tri Kartika Sari

Nomor Mahasiswa : 14313236

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2017

DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

TAHUN 2007-2016

Tri Kartika Sari

Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

tika0402@yahoo.com

ABSTRAK

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu hal yang terpenting pada suatu daerah karena dengan adanya penyerapan tenaga kerja maka angka pengangguran akan dapat berkurang. Penelitian ini bertujuan menganalisis seberapa besar pengaruh upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2007-2016. Metode analisis yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan regresi panel data dengan metode estimasi *Fixed Effect* pada taraf nyata 5 persen. Data dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi online BPS berbentuk data sekunder yang terdiri dari variabel terikat yaitu penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk bekerja (Agustus) di Indonesia pada tahun 2007-2016, sedangkan variabel bebas yang digunakan yaitu upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto di Indonesia pada tahun 2007-2016. Data diambil dari 33 provinsi di Indonesia. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia, indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia, sedangkan angkatan kerja dan produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Kata kunci: Penyerapan Tenaga Kerja, UMP, IPM, Angkatan Kerja, dan PDRB.

I. PENDAHULUAN

Bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang sangat esensial dalam usaha memajukan perekonomian suatu bangsa. Usaha yang dimaksud yaitu penyediaan lapangan kerja yang cukup agar dapat mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja. Salah satu tema utama bidang ketenagakerjaan adalah kesempatan kerja sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Kesempatan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain upah tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, angkatan kerja, dan pendapatan nasional. Apabila faktor-faktor tersebut mengalami perubahan maka akan mempengaruhi tingkat kesempatan kerja.

Kesempatan kerja dapat diartikan juga sebagai permintaan terhadap tenaga kerja di pasar tenaga kerja (*demand for labour force*), dimana kesempatan kerja sama dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia di dunia kerja. Semakin meningkat kegiatan pembangunan maka akan semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini menjadi sangat penting karena semakin besar kesempatan kerja bagi tenaga kerja maka kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin baik, dan sebaliknya. Di sisi lain, meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tinggi dalam waktu yang cepat, sedangkan kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas maka akan menyebabkan timbulnya pengangguran.

Permasalahan paling pokok dalam ketenagakerjaan Indonesia terletak pada tingkat kesempatan kerja. Adanya ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk usia kerja dengan ketersediaan kesempatan kerja akan menimbulkan *gap* yang disebut pengangguran. Pengangguran ini pada akhirnya akan membawa dampak ketidakstabilan ekonomi yang akan berimbas pada ketidakstabilan di bidang kehidupan lainnya. Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Data Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia (dalam juta jiwa)

Jenis Kegiatan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Penduduk Usia Kerja	164,19	166,64	169,33	172,07	173,85	176,87	179,97	182,99	186,10	189,10
Angkatan Kerja	109,94	111,95	113,83	116,53	116,10	119,85	120,17	121,87	122,38	125,44
Penduduk Bekerja	99,93	102,55	104,87	108,21	107,42	112,50	112,76	114,63	114,82	118,41
Pengangguran Terbuka (%)	10,01	9,39	8,96	8,32	8,68	7,34	7,41	7,24	7,56	7,03
Kesempatan Kerja	90,89	91,61	92,13	92,86	92,52	93,87	93,83	94,06	93,82	94,39

Sumber: BPS (2007-2016)

Tercatat pada tahun 2016 terdapat 189,10 juta jiwa penduduk yang berada pada usia kerja. Namun di sisi lain, jumlah penduduk yang bekerja pada tahun yang sama sebanyak 118,41 juta jiwa. Data jumlah penduduk yang bekerja ini pun masih termasuk mereka yang bekerja pada usia di luar usia kerja (15 tahun ke

bawah). Tingkat pengangguran terbuka yang terjadi pada tahun ini sebesar 7,03% dengan tingkat kesempatan kerja sebesar 94,39 juta jiwa.

Dari tabel diatas dapat diperhatikan bahwa dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2007-2016 penduduk usia kerja dan angkatan kerja selalu mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah kesempatan kerja yang tersedia selalu berada di bawahnya bila dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Tampak bahwa penyerapan tenaga kerja Indonesia dalam kurun waktu tersebut masih tergolong rendah. Kondisi ini yang akan menciptakan *gap* antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia sehingga pengangguran senantiasa ada sehingga menjadi masalah yang harus dicari pemecahannya untuk diminimalisir jumlahnya setiap tahun.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Kajian Pustaka

Penelitian terkait analisis pengaruh PDRB, tingkat upah riil, dan investasi riil terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta, dimana metode penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, tingkat upah riil dan investasi riil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga di DKI Jakarta (Dimas, 2009).

Penelitian terkait analisis pengaruh upah minimum provinsi dan kesejahteraan masyarakat terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi di Indonesia, dimana metode penelitian ini menggunakan regresi panel data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi di Indonesia (Sulistiawati, 2012).

Penelitian terkait analisis pengaruh upah minimum, PDRB, angkatan kerja, dan investasi terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember, dimana metode penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*) dengan data runtut waktu (*time series*) mulai dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2007. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember, sedangkan PDRB, angkatan kerja, dan investasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember (Utami, 2009).

Penelitian terkait analisis pengaruh inflasi, PDRB, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali, dimana metode penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*) dengan data runtut waktu (*time series*) mulai dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan inflasi, PDRB, dan upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan secara parsial, PDRB dan upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan sementara inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali (Indradewa, 2013).

Landasan Teori

Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai kemampuan lapangan kerja dalam menyerap tenaga kerja yang memenuhi kriteria pada lapangan kerja tersebut. Jumlah penyerapan tenaga kerja dapat sama atau bahkan lebih kecil jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Apabila jumlah kesempatan kerja sama dengan jumlah penyerapan kerja maka tidak akan terjadi pengangguran. Namun, apabila jumlah penyerapan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah kesempatan kerja maka akan terjadi pengangguran (Feriyanto, 2014).

Upah Minimum Provinsi

Sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 maka upah pekerja disebut dengan istilah UMR atau UMP. UMP dapat diartikan sebagai suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawainya sesuai dengan ketentuan provinsi tempat perusahaan itu berada.

Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (*United Nations Development Program*) indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan perkembangan manusia. Adapun angka dari IPM ini berkisar antara 0-100 atau 0-1, semakin mendekati 100 atau angka 1 maka pembangunan manusia pada suatu negara atau daerah akan semakin baik.

Angkatan Kerja

Angkatan kerja dapat didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Oleh karena itu, angkatan kerja dapat diartikan sebagai penduduk yang sudah memasuki usia kerja (berusia 15-65 tahun), baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan.

Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian yang terdapat di suatu wilayah. Pada suatu daerah besarnya nilai PDRB dapat digunakan untuk melihat potensi sumber daya alam dan faktor produksi yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan regresi panel data. Data panel (*pooled data*) atau disebut juga data longitudinal merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Sumber data diperoleh dari publikasi online Badan Pusat Statistik (BPS).

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto) terhadap variabel terikat (penyerapan tenaga kerja). Peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda panel data. Berikut persamaan estimasi penelitian ini:

$$PTKit = \beta_0 + \beta_1UMPit + \beta_2IPMit + \beta_3AKit + \beta_4PDRBit + eit$$

Keterangan:

PTK	: Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa)
t	: Tahun yang diteliti 2007-2016
i	: Provinsi
β_0	: intersept (konstanta)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: koefisien regresi masing-masing variabel
UMP	: Upah Minimum Provinsi (Rupiah)
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia (Persen)
AK	: Angkatan Kerja (Jiwa)
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah)
e	: error

IV. HASIL DAN ANALISIS

Pemilihan Model

Uji Chow

Uji *Chow* digunakan untuk memilih metode estimasi terbaik antara metode *common effect* atau *fixed effect*. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan uji *Chow* dengan probabilitas 0.05. Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji *Chow* sebagai berikut:

Ho: *Common Effect*

Ha: *Fixed Effect*

Dengan kriteria pengambilan keputusan jika nilai probabilitas untuk *cross-section* F pada uji regresi dengan pendekatan *fixed effect* lebih dari 0.05 (tingkat signifikansi atau $\alpha = 5\%$) maka H_0 diterima sehingga model yang terpilih adalah *pooled least square*. tetapi jika nilainya kurang dari 0.05 maka H_0 ditolak sehingga model yang terpilih adalah *fixed effect*.

Tabel 2: Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: PANEL
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	131.465276	(32.293)	0.0000
Cross-section Chi-square	901.439670	32	0.0000

Berdasarkan hasil pengujian uji *Chow* pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section F* sebesar 0.0000 lebih kecil dari signifikansi sebesar 0.05 ($0.0000 < 0.05$) sehingga H_0 ditolak. Artinya dalam penelitian ini model estimasi *fixed effect* lebih baik dibandingkan dengan model *pooled least square*. Setelah mengetahui bahwa metode *fixed effect* lebih baik daripada metode *common effect* selanjutnya perlu dilakukan uji *Hausman*.

Uji Hausman

Metode pemilihan estimasi selanjutnya yang digunakan adalah uji *Hausman*. Uji *Hausman* dilakukan untuk menentukan model estimasi yang lebih tepat digunakan antara model *fixed effect* dan *random effect*. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan uji *Hausman* dengan probabilitas 0.05. Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji *Hausman* adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Dengan kriteria pengambilan keputusan. jika nilai untuk probabilitas lebih besar dari 0.05 (tingkat signifikansi atau $\alpha = 5\%$) maka H_0 diterima sehingga model yang terpilih adalah *random effect*, tetapi jika nilainya kurang dari 0.05 maka H_0 ditolak sehingga model yang terpilih adalah *fixed effect*.

Tabel 3: Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: PANEL
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	157.386560	4	0.0000

Berdasarkan hasil pengujian uji *Hausman* pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang nilainya lebih kecil dari 0.05 sehingga H_0 ditolak. Artinya dalam penelitian ini model estimasi yang lebih tepat digunakan adalah *fixed effect* daripada *random effect*. Berdasarkan hasil uji *Chow* dan uji *Hausman* maka metode yang paling tepat digunakan dalam model penelitian ini adalah metode *fixed effect*.

Estimasi Model Regresi *Fixed Effect*

Estimasi model regresi menggunakan data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh dari upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja. Setelah melakukan pemilihan model terbaik maka diperoleh hasil estimasi model terbaik sebagai berikut:

Tabel 4: Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Dependent Variable: PTK?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 11/02/17 Time: 14:25
 Sample: 2007 2016
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 33
 Total pool (balanced) observations: 330

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-848251.1	696856.9	-1.217253	0.2245
UMP?	-0.073980	0.019980	-3.702655	0.0003
IPM?	8141.532	10297.02	0.790669	0.4298
AK?	0.989627	0.012395	79.83997	0.0000
PDRB?	0.791981	0.049168	16.10762	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
 Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.999932	Mean dependent var	3319886.
Adjusted R-squared	0.999922	S.D. dependent var	4748803.
S.E. of regression	42049.29	Akaike info criterion	24.25974
Sum squared resid	5.02E+11	Schwarz criterion	24.78931
Log likelihood	-3956.857	Hannan-Quinn criter.	24.47098
F-statistic	93240.60	Durbin-Watson stat	1.094155
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari tabel hasil estimasi *fixed effect* diatas dapat dilihat tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar -848251.1 jiwa dengan asumsi variabel independen (UMP, IPM, AK, dan PDRB) lainnya tidak ada.

- a. Upah Minimum Provinsi naik 1 rupiah maka akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sebesar -0.073980 jiwa.
- b. Indeks Pembangunan Manusia naik 1 persen maka akan menaikkan penyerapan tenaga kerja sebesar 8141.532 jiwa.
- c. Angkatan Kerja naik 1 jiwa maka akan menaikkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.989627 jiwa.
- d. Produk Domestik Regional Bruto naik 1 milyar rupiah maka akan menaikkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.791981 jiwa.

Uji Hipotesis

Uji t (Penguji Hasil Individu)

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi atau tidak variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara individu.

a. Pengujian Terhadap Koefisien Upah Minimum Provinsi (β_1)

Berdasarkan dari koefisien yang dihasilkan oleh upah minimum provinsi adalah -0.073980 sementara t-hitung adalah -3.702655 sedangkan probabilitas yang dihasilkan adalah 0.0003 kurang dari α 5% ($0.0003 < 0.05$) sehingga secara statistik variabel upah minimum provinsi (X1) signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja (Y) dimana H_0 ditolak dan menerima H_a maka model estimasi *fixed effect* variabel upah minimum provinsi (X1) berpengaruh negatif penyerapan tenaga kerja (Y).

b. Pengujian Terhadap Koefisien Indeks Pembangunan Manusia (β_2)

Berdasarkan dari koefisien yang dihasilkan oleh indeks pembangunan manusia adalah 8141.532 sementara t-hitung adalah 0.790669 sedangkan probabilitas yang dihasilkan adalah 0.4298 lebih dari α 5% ($0.4298 > 0.05$) sehingga secara statistik variabel indeks pembangunan manusia (X2) tidak signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja (Y) dimana H_0 diterima dan menolak H_a maka model estimasi *fixed effect* variabel indeks pembangunan manusia (X2) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja (Y).

c. Pengujian Terhadap Koefisien Angkatan Kerja (β_3)

Berdasarkan dari koefisien yang dihasilkan oleh angkatan kerja adalah 0.989627 sementara t-hitung adalah 79.83997 sedangkan probabilitas yang dihasilkan adalah 0.0000 kurang dari α 5% ($0.0000 < 0.05$) sehingga secara statistik variabel angkatan kerja (X3) signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja (Y) dimana H_0 ditolak dan menerima H_a maka model estimasi *fixed effect* variabel angkatan kerja (X3) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja (Y).

d. Pengujian Terhadap Koefisien Produk Domestik Regional Bruto (β_4)

Berdasarkan dari koefisien yang dihasilkan oleh produk domestik regional bruto adalah 0.791981 sementara t-hitung adalah 16.10762 sedangkan probabilitas yang dihasilkan adalah 0.0000 kurang dari α 5% ($0.0000 < 0.05$) sehingga secara statistik variabel produk domestik regional bruto (X4) signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja (Y) dimana H_0 ditolak dan menerima H_a maka model estimasi *fixed effect* variabel produk domestik regional bruto (X4) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja (Y).

Uji F (Uji Secara Menyeluruh)

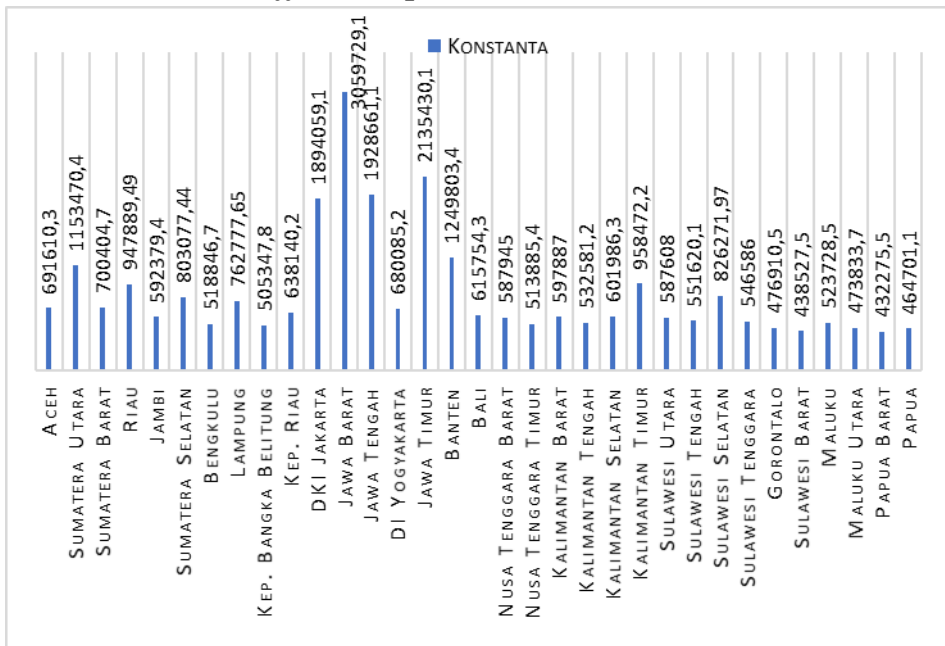
Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikan variabel independen terhadap variabel dependen secara menyeluruh (bersama-sama).

F-hitung dalam perhitungan menggunakan Eviews sebesar 93240.60 dan probabilitasnya sebesar 0.000000 (kurang dari $\alpha = 5\%$) sehingga secara statistik model estimasi *fixed effect* variabel independen upah minimum provinsi (X1), indeks pembangunan manusia (X2), angkatan kerja (X3), dan produk domestik regional bruto (X4) secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen penyerapan tenaga kerja (Y).

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil estimasi *fixed effect* menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.999932. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen upah minimum provinsi (X1), indeks pembangunan manusia (X2), angkatan kerja (X3), dan produk domestik regional bruto (X4) mampu menjelaskan variabel dependen penyerapan tenaga kerja (Y) sebesar 99.99%, sedangkan sisanya sebesar 0.01% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

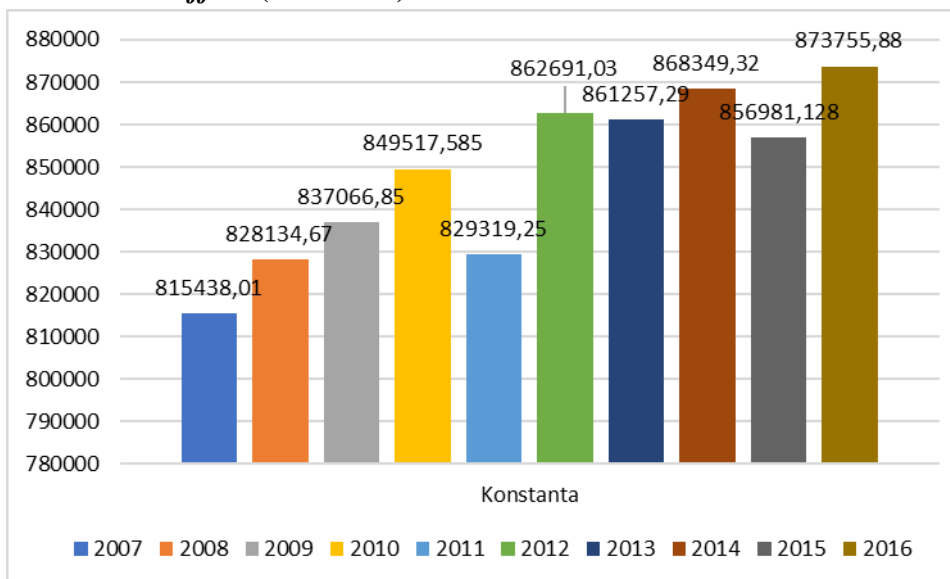
Analisis Cross Section Effect (Perprovinsi)



Gambar 1: Grafik Hasil Konstanta Cross Section Effect

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu berada di provinsi Jawa Barat sebesar 3059729,1. Kemudian peyerapan tertinggi setelah Jawa Barat yaitu provinsi Jawa Timur sebesar 2135430,1 dan penyerapan tenaga kerja terendah yaitu berada di provinsi Papua Barat sebesar 432275,5.

Analisis Period Effect (Pertahun)



Gambar 2: Grafik Hasil Konstanta *Period Effect*

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja dari tahun 2007 sampai tahun 2010 mengalami peningkatan yakni 815438,01 menjadi 849517,585. Akan tetapi pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 829319,25 dan tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami fluktuasi. Hingga penyerapan tenaga kerja yang tertinggi yaitu pada tahun 2016 mencapai 873755,88.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data di atas, diperoleh model yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah menggunakan model *fixed effect*. Dari hasil pengujian model *fixed effect* disimpulkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan upah akan mengakibatkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, maka harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Hal tersebut mendorong pengusaha untuk mengganti tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harganya lebih murah guna mempertahankan keuntungan. Kenaikan upah juga mendorong perusahaan meningkatkan harga per unit produk sehingga konsumen cenderung mengurangi konsumsi produk tersebut. Hal ini menyebabkan banyak hasil produksi yang tidak terjual, akibatnya produsen terpaksa mengurangi jumlah produksinya. Pengurangan jumlah produksi tersebut pada akhirnya akan mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dimas (2009) menyimpulkan bahwa tingkat upah riil terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawati (2012) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa upah minimum provinsi terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi di Indonesia. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Utami (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa upah minimum terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember tahun 1980-2007.

Selanjutnya diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang berarti ketidaksignifikan indeks pembangunan manusia dalam penelitian ini diakibatkan oleh ketidakmerataan kualitas kesehatan, pendidikan, dan perekonomian di antar provinsi di Indonesia. Dimana dari 33 provinsi, terdapat sebanyak 9 provinsi yang memiliki IPM di atas angka nasional dan 24 provinsi yang memiliki IPM di bawah angka nasional. Idealnya adalah rasio antar banyaknya provinsi dengan IPM di atas angka nasional dengan

banyaknya provinsi dengan IPM di bawah angka nasional sebesar 50:50 namun pada kenyataannya rasionya adalah sebesar 27:73, hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi di antar provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawati (2012) yang menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi di Indonesia.

Kemudian variabel angkatan kerja menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang berarti jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat dengan strata pendidikan yang semakin baik dari tahun ke tahun maka akan menyebabkan peningkatan terhadap penyerapan tenaga kerja, dimana angkatan kerja yang besar jika dapat dimanfaatkan dengan baik maka akan mampu meningkatkan perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan sehingga penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2009) yang menyimpulkan bahwa angkatan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember tahun 1980-2007.

Selanjutnya diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, yang berarti peningkatan nilai produk domestik regional bruto menandakan bahwa jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah juga meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi. Sehingga penyerapan tenaga kerja akan bertambah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dimas (2009) yang menyimpulkan bahwa produk domestik regional bruto terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Utami (2009) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa produk domestik regional bruto terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Jember tahun 1980-2007. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Indradewa (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa produk domestik regional bruto terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.

V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh dari variabel-variabel yang meliputi upah minimum provinsi, indeks pembangunan manusia, angkatan kerja, dan produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia tahun 2007-2016 dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
4. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Implikasi

1. Upah minimum provinsi seharusnya disesuaikan dengan keadaan daerahnya, sehingga penetapan upah minimum provinsi tidak hanya menguntungkan tenaga kerja saja maupun menguntungkan pengusaha saja namun juga dapat memberikan keuntungan bersama. Upah minimum provinsi yang terlalu rendah akan menyengsarakan tenaga kerja namun sebaliknya upah minimum provinsi yang terlalu besar juga akan mematikan pengusaha sehingga harus ada regulasi serta kebijakan pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi sehingga tidak hanya melihat satu sisi saja. Selain itu adanya kebijakan upah minimum provinsi harus disesuaikan dengan tingkat produktivitas dari tenaga kerja, dimana peningkatan upah minimum provinsi harus disesuaikan dengan adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk mengurangi resiko pengurangan jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh produsen.
2. Angkatan kerja berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kebijakan wajib belajar 12 tahun agar angkatan kerja yang dihasilkan oleh Indonesia lebih baik lagi. Selain itu, pendidikan informal juga sangat penting untuk mengembangkan *softskill* yang ada dalam diri seseorang.
3. Produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia, sehingga pemerintah perlu mengambil kebijakan dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan-pengembangan kegiatan ekonomi yang mendorong meningkatnya output

yang dihasilkan setiap provinsi seperti kegiatan sentra industri menurut wilayah, pengembangan berbasis peningkatan wilayah, dan pembangunan menurut karakteristik daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. BP STIE YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2007-2016). *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2007-2016*. Diambil 28 September 2017, dari <http://www.bps.go.id>.
-
- _____. *Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu 2007-2016*. Diambil 28 September 2017, dari <http://www.bps.go.id>.
-
- _____. *Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2007-2016*. Diambil 28 September 2017, dari <http://www.bps.go.id>.
-
- _____. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Provinsi 2007-2016*. Diambil 28 September 2017, dari <http://www.bps.go.id>.
-
- _____. *Upah Minimum Regional/Provinsi 2007-2016*. Diambil 28 September 2017, dari <http://www.bps.go.id>.
- Baltagi, Badi H. (2008). *Econometrics*. Springer-Verlag, Berlin.
- Bellante, Don dan Jackson, Mark. (1990). *Ekonomi Ketenagakerjaan*. LP FE UI, Jakarta.
- Dimas, Nenek Woyanti. (2009). *Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 16. No. 1. Hal. 31-41.
- Feriyanto, Nur. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Inradewa, I Gusti Agung. (2013). *Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 8. No. 4. Hal. 923-950.
- Simanjuntak, Payaman J. (1985). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. LPFE UI, Jakarta.
- Sriyana, Jaka. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Ekonisia, Yogyakarta.
- Subri, Mulyadi. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (1997). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sulistiawati, Rini. (2012). *Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi. Vol. 8. No. 3. Hal. 195-211.

- Sumarsono, Sonny. (2009). *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suroto. (1992). *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Tarigan, Robinson. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Utami, Turminijanti Budi. (2009). *Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, Produk Domestik Regional Bruto, Angkatan Kerja dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Kabupaten Jember*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Pembangunan*. Vol. 1. No. 1. Nopember 2009.